



PEMERINTAH KOTA DUMAI
JL. Tuanku Tambusai Telp. (0765)
440226

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI



**TAHUN ANGGARAN
2024**

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Cascading Kinerja.....	5
1.6 Peta Proses Bisnis.....	7
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	13
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program.....	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI	
3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024.....	23
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	25
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra.....	32
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target/SPM).....	34
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	35
3.6 Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	40
3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta Lampiran Perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023	xiii
Tabel 2	Program Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023	xiv
Tabel 3	Perubahan Program Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai	xiv
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	xv
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023.....	xvii
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023.....	xix
Tabel 7	Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
Tabel 8	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024.....	15
Tabel 9	Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024	16
Tabel 10	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024.....	17
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023	18
Tabel 12	Program Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	19
Tabel 13	Program Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Dumai	20
Tabel 14	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 15	Atribut Capaian Indikator Kinerja	23
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun tahun Sebelumnya.....	26
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	34
Tabel 18	Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	40
Tabel 19	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
Tabel 20	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	4
Gambar 2	Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	6
Gambar 3	Peta Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kota Dumai	8
Gambar 4	Misi ke - 4 Kota Dumai.....	13

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Urusan Pemerintahan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 15 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI



HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710605 199903 1013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Urusan Pendukung yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang secara teknis bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPRD.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke-4 pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik “ dan SASARAN yang ke 2 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.** “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Atau Dinas Jabatan

- Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

- Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

- Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

- Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari:

- Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
- Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Subkegiatan Pembahasan APBD
- Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan
- Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester
- Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari :

- Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

- Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Subkegiatan Pelaksanaan Reses
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
- Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
8. Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

- o Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- o Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami Dua kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	1 Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD .	95 %
		2 Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	85%
		3 Persentase Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	95%
		4 Persentase Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	95%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 73.056.330.022,24,,(Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Dua ribu dua Puluh Empat Sen)* untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2

Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 45.752.107.024	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 11.855.630.163	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 57.607.737.187,	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 52.570.174.405,24	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 20.486.155.617,-	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 73.056.330.022,24,-	

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%	√			
		Persentase Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	85%	85%	100%	√			
		Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program –program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam	95%	95%	100%	√			
		Persentase Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	95%	95%	100%	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori sangat berhasil dengan tingkat capaian kinerja 100%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar didukung dengan anggaran sebesar Rp **73.056.330.022,24**,(*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Dua ribu dua Puluh Empat Sen*) bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. Rp. 70.568.610.164,24,- (*Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat Sen*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 2.487.719.858,- (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*)

1. Belanja Operasi	:	Rp.	70.568.610.164,24
2. Belanja Modal	:	Rp.	2.487.719.858
J u m l a h	:	Rp.	73.056.330.022,24

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%			
Sasaran : Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	85%	85%	100%			
	Persentase Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)	95%	95%	100%			

	maupun dokumen Rencana Tahunan						
	Persentase Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	95%	95%	100%			
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	Rp52,570,174,405	74,74%	74,74%
Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	Rp18,290,709,617	72,52%	72,52%

Sebagaimana data tersebut di atas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					
		Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT					
		Persentase Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan					
		Persentase Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD					
		Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Indikator Kinerja Utama* Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
2. *Indikator Kinerja Utama* Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD tingkat efisiensinya adalah 1.16 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (85%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
4. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerinta

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

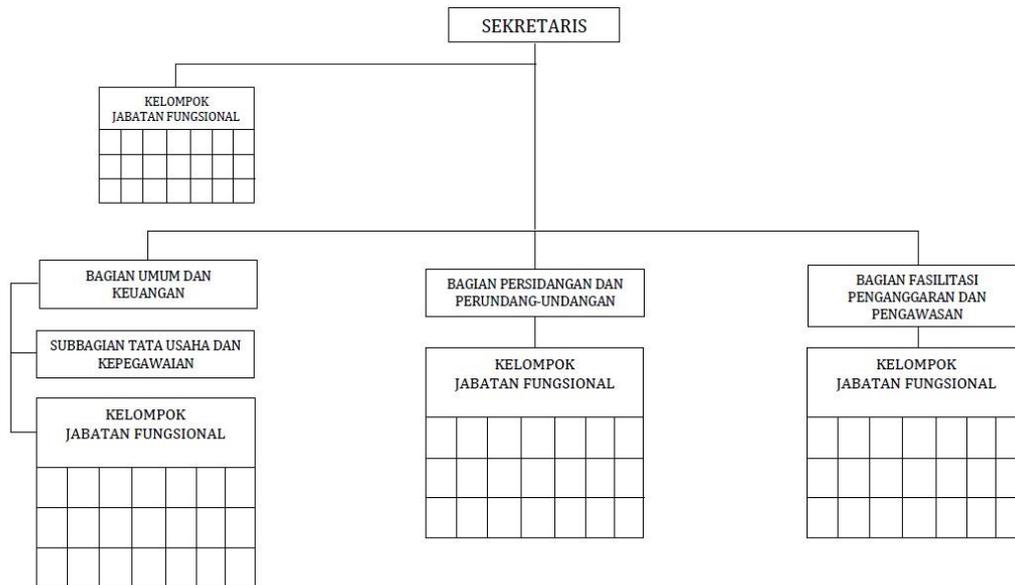
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;

2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Struktur Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimaksudkan untuk

menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Pendukung yang perlu ditangani sbb:

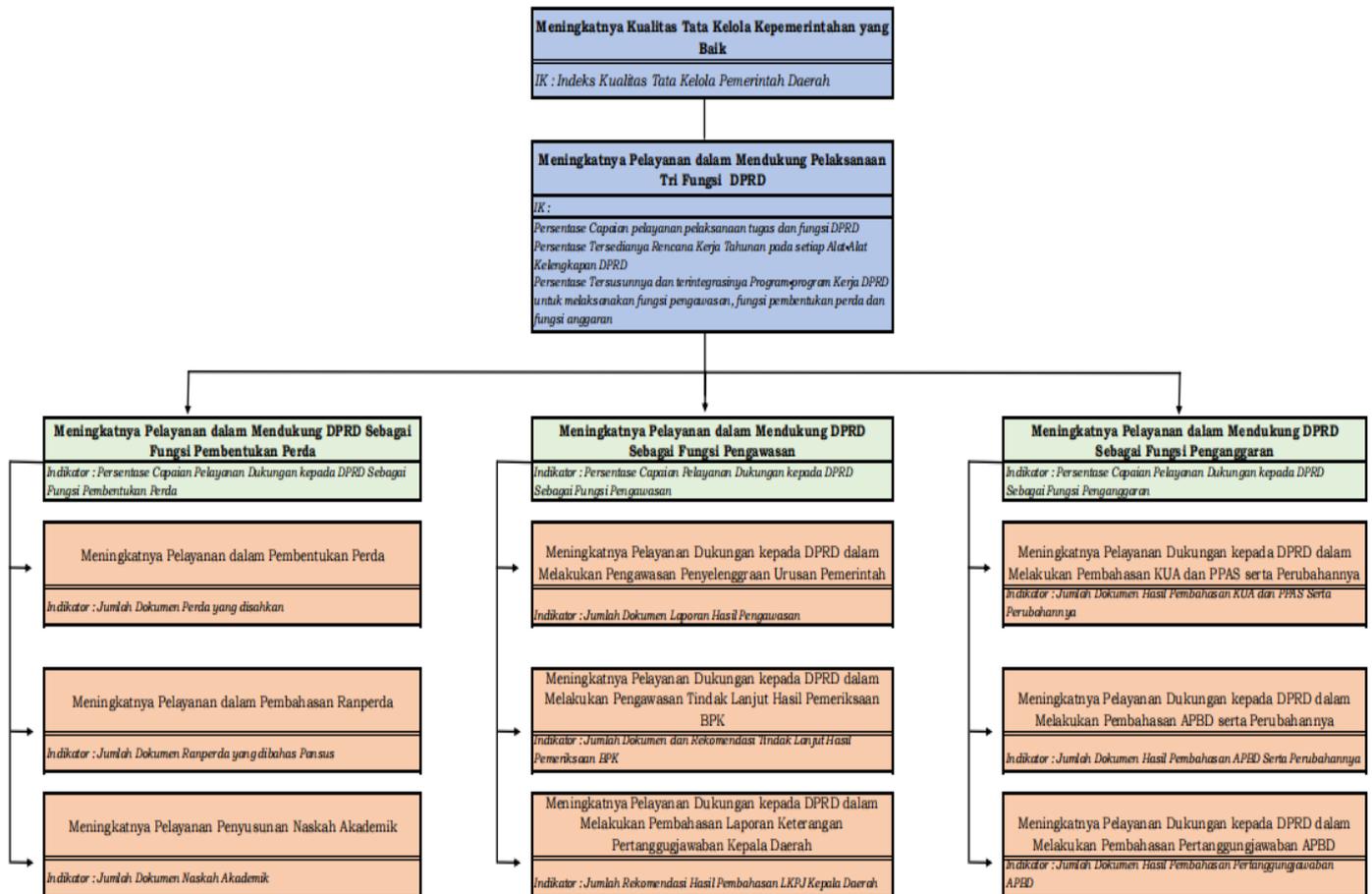
1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 2

**POHON KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DUMAI**

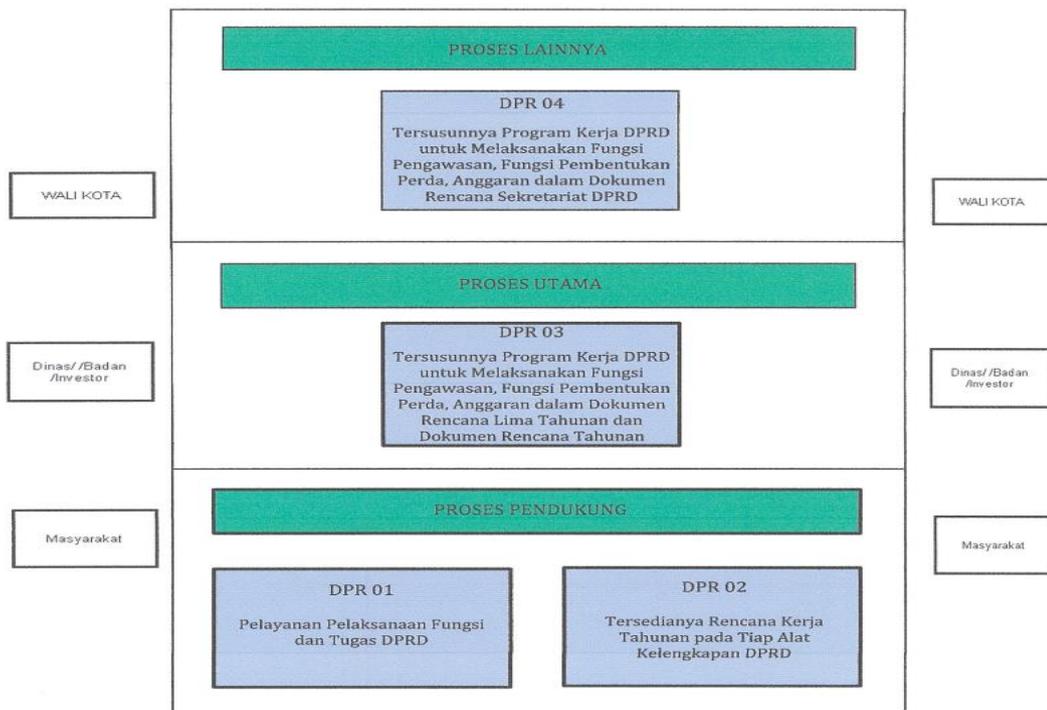


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 3

Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Walikota Dumai Nomor : 700/1328.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil evaluasi Implementasi SAKIP Internal Sekretariat DPRD Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 7 : Tindak Lanjut Atas Evaluasi Sakip Tahun 2023

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status Penyelesaian	Aksi/Evidence
1.	Agar Sekretariat DPRD Kota Dumai Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja Dan Laporan Kinerja Berupa Dokumen Perubahan Renstra 2021-2026, Renja Tahun 2023, Renja Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dan LKJIP Tahun 2022 Pada Website Resmi Sekretariat DPRD Kota Dumai	Sekretariat DPRD Kota Dumai Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja Dan Laporan Kinerja Berupa Dokumen Perubahan Renstra 2021-2026, Renja Tahun 2023, Renja Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dan LKJIP Tahun 2022 Pada Website Resmi Sekretariat DPRD Kota Dumai	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	Lampiran Bukti Publikasi : 1. Dokumen Perencanaan Kinerja https://dprd.dumaikota.go.id/dokumen/0326a13ded2eeff98bafdf1368ad8dd4.pdf 2. Perubahan Renstra Tahun 2021 - 2026 https://drive.google.com/file/d/1P3_ARWetgiH8ebuMqnFKEGmx24Lmp0w9/view?usp=sharing 3. Renja Tahun 2023 https://drive.google.com/file/d/1Lpf2UdaC4vf2ZE2WPMJ1HT46h6Diy8RZ/view?usp=sharing 4. Renja Tahun 2024 https://dprd.dumaikota.go.id/dokumen/8d9e34ca814f8d95329bdf48ddeb5b9.pdf 5. Perubahan Renja Tahun 2023 https://drive.google.com/file/d/1xTa1OGIsqVCc1_Q0q7q8HLbYI8kqWmBA/view?usp=sharing

							<p>6. Perjanjian PK Tahun. 2023 https://drive.google.com/file/d/1wfCNeLOXYfcHS84uIDZnSsyvGrF9Gm4v/view?usp=sharing</p> <p>7. LKJiP https://drive.google.com/file/d/14yeRky8rSqqHOBpS-EKlItuRzOv0xTD/view?usp=sharing</p>
2.	Agar Penetapan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dirumuskan Dan Ditetapkan Oleh Seluruh Pegawai Secara Berjenjang Mulai Dari Jabatan Structural, Jabatan Fungsional Tertentu Sampai Dengan Jabatan Fungsional Umum Pada Setiap Unit Kerja Di Sekretariat DPRD Kota Dumai	Menyusun Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dirumuskan Dan Ditetapkan Oleh Seluruh Pegawai Secara Berjenjang Mulai Dari Jabatan Structural, Jabatan Fungsional Tertentu Sampai Dengan Jabatan Fungsional Umum Pada Setiap Unit Kerja Di Sekretariat DPRD Kota Dumai	September 2023	September 2023	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	Dokumen Perjanjian Kinerja Dapat Dilihat Pada Link Berikut: https://drive.google.com/file/d/1wfCNeLOXYfcHS84uIDZnSsyvGrF9Gm4v/view?usp=sharing
3.	Setiap Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kota Dumai Agar Dapat Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkala Atas Rencana Aksi Untuk Mendukung Capaian Kinerja	Melakukan Rapat Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkala Atas Rencana Aksi Untuk Mendukung Capaian Kinerja	November 2023	November 2023	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai namun belum dilakukan secara maksimal	Dokumentasi pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan secara berkala tiap bulannya. https://drive.google.com/drive/folders/1mpKMTub0jllCh2GyeeiINlbhES9R9f6N?usp=sharing

4.	Dalam Rangka Perumusan Dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Agar Menuangkan Informasi Keterkaitan Hubungan Kinerja/Integrasi Antar Bidang Dengan Tugas Dan Fungsi Lainnya Yang Dapat Digambarkan Melalui Crosscutting	Merumuskan Dan Menyusun Crosscutting Sekretariat DPRD Kota Dumai	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	https://drive.google.com/file/d/19qDDjpPXnsoplecs7SgwnEiMDWwGbsB/view?usp=drive_link
5.	Sekretariat DPRD Agar Melakukan Perbaikan Pada Indikator Kinerja Utama Yang Memuat Definisi Operasional Dan Formulasi Perhitungan Dari Indicator Kinerja	Melakukan Perbaikan Pada Indikator Kinerja Utama Yang Memuat Definisi Operasional Dan Formulasi Perhitungan Dari Indicator Kinerja Yang Tercantum Didalam Perubahan Renstra 2021-2026 dan Dokumen LKJIP	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	Dokumen Perubahan Renstra dan Dokumen LKJIP dapat dilihat pada link dibawah Ini : https://drive.google.com/file/d/14veRky8rSqqHOBpS-EKlItuRzOv0xTD/view?usp=sharing
6.	Sekretariat DPRD Kota Dumai Perlu Menyusun Mekanisme Atas Standar Operasional Prosedur Terkait Pengumpulan Data Dan Pengukuran Kinerja Dimasa Yang Akan Datang	Menyusun Mekanisme Atas Standar Operasional Prosedur Terkait Pengumpulan Data Dan Pengukuran Kinerja Dimasa Yang Akan Datang	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	Dokumen SOP terkait Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja : https://drive.google.com/file/d/1b7q2RPGI6ACA1K8JwRcd90RBhCxXdQe/view?usp=sharing
7.	Pimpinan / Atasan Sekretariat DPRD perlu melakukan pengukuran capaian kinerjanya, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kepada bawahan secara berlaka pada aplikasi e kinerja BKN	Pimpinan / Atasan Sekretariat DPRD perlu melakukan pengukuran capaian kinerjanya	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	https://drive.google.com/file/d/1mZVhVfK1aYnPxzAexGluSoHriXv8t1/view?usp=sharing
8.	Agar Seluruh ASN Pada Secretariat DPRD Kota Dumai Dapat Melaporkan Aktivitas Dari Hasil Pengukuran Kinerjanya Secara Berkala Setiap Bulan Pada Aplikasi E Kinerja BKN	Seluruh ASN Pada Secretariat DPRD Kota Dumai Melaporkan Aktivitas Dari Hasil Pengukuran Kinerjanya Secara Berkala Setiap Bulan Pada Aplikasi E Kinerja BKN	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	https://drive.google.com/file/d/1fuYcVYj9aoaUrla1BXBSGEWUOMYM6sHi/view?usp=sharing

9.	Sekretariat DPRD Kota Dumai Dalam Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Berikutnya Agar Dapat Memberikan / Memuat Informasi Mengenai Perbandingan Kinerja Dilevel Nasional/Internasional (Benchmark) Dan Informasi Terkait Efisiensi Penggunaan Anggaran Dan Sumber Daya	Memberikan / Memuat Informasi Mengenai Perbandingan Kinerja Dilevel Nasional/Internasional (Benchmark) Dan Informasi Terkait Efisiensi Penggunaan Anggaran Dan Sumber Daya yang tercantum didalam LKJIP tahun 2023	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	Dokumen LKJIP Sekretariat DPRD Kota Dumai https://drive.google.com/file/d/14yeRky8rSqqHOBpS-EKl_ltuRzOv0xTD/view?usp=sharing
10.	Agar Informasi Yang Disajikan Pada Laporan Kinerja Menjadi Bahan Perhatian Utama Dan Bahan Evaluasi Bagi Setiap Jajaran Asn Yang Ada Pada Secretariat DPRD Guna Penyesuaian Strategi Dan Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun Berikutnya	Menjadikan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya Sebagai Bahan Review Untuk Menentukan Arah Dan Strategi Kebijakan Untuk Mencapai Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun Berikutnya, Sebagai Evidence Terdapat Pada Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Secretariat DPRD Pada Tahun 2025	Januari 2024	Januari 2024	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Output Sudah Tercapai	Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 https://drive.google.com/file/d/1qGmlgqfcuzwKrK0T5dNC96n2Hr6Qv-3C/view?usp=sharing

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 4



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan

merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8: Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Dumai Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA DUMAI			IKU SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	IndikatorRenstra
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
					Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD
		Persentase Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan			
		Indeks SPBE			Persentase Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 9
Strategi dan Kebijakan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	1 Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Dumai

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka terdapat perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	1. Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		2. Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT
		3. Persentase Tersusunnya

		dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan
		4. Persentase Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi	1. Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD .	95 %
		2. Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat	85%

Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	
	3 Persentase Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	95%
	4 Persentase Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	95%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 73.056.330.022,24, (Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Dua ribu dua Puluh Empat Sen)*

Tabel 12
Program kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 45.752.107.024	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 11.855.630.163	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 57.607.737.187,	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Program kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 52.570.174.405,24	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 20.486.155.617,-	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 73.056.330.022,24,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 14
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 15
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Capaian kinerja untuk indikator **Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD** menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 95%, hal ini menunjukkan capaian indikator bernilai kinerja Sangat Tinggi (sangat rendah/ rendah/ sedang/ tinggi/ sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

Efisiensi Anggaran	73,14%
Nilai Anggaran	Rp 73.056.330.022,24,-
Capaian 2024	100%
Target	95%
Realisasi	95%

b. Indikator Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 85% realisasi sebesar 85%, hal ini menunjukkan capaian kinerja indikator bernilai kinerja sangat tinggi (sangat rendah/ rendah/ sedang/ tinggi/ sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

Efisiensi Anggaran	73,14%
Nilai Anggaran	Rp 73.056.330.022,24,-
Capaian 2024	100%
Target	85%
Realisasi	85%

c. Indikator Persentase Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 95%, hal ini menunjukkan capaian kinerja bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 ada atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

Efisiensi Anggaran	73,14%
Nilai Anggaran	Rp 73.056.330.022,24,-
Capaian 2024	100%
Target	95%
Realisasi	95%

d. Indikator Persentase Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 95%, hal ini menunjukkan capaian kinerja indikator bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 ada atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

Efisiensi Anggaran	73,14%
Nilai Anggaran	Rp 73.056.330.022,24,-
Capaian 2024	100%
Target	95%
Realisasi	95%

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	-	95%	95%	-	100%	100%	-
		Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	-	-	95%	-	-	95%	-	-	100%
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	ada	ada	-	ada	ada	-	100%	100%	-
		Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	-	-	85%	-	-	85%	-	-	100%
		Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	ada	ada	-	ada	ada	-	100%	100%	-

		Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan		-	-	95%		-	-	95%		-	-	100%
		Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		ada	ada	-		ada	ada	-		100%	100%	-
		Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		-	-	95%		-	-	95%		-	-	100%

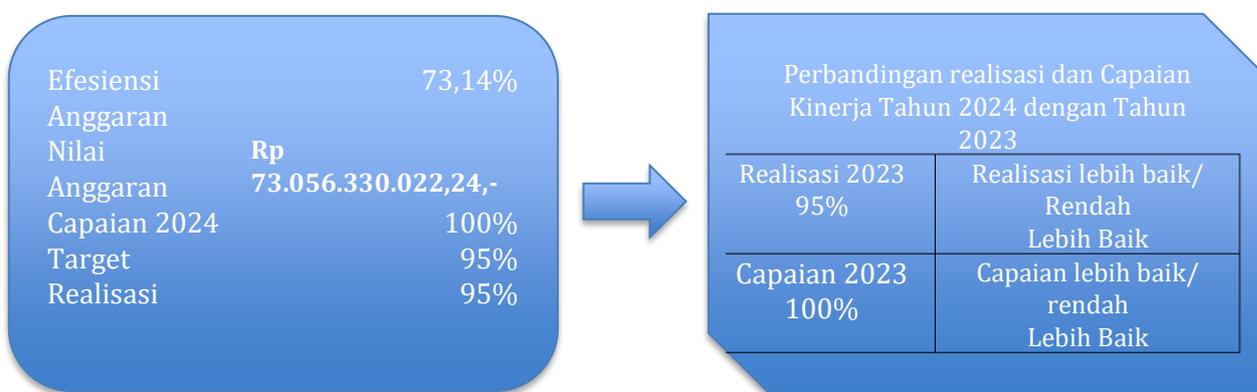
Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Pada tahun 2023 terdapat empat Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target pada tahun 2023 adalah 95% berasal dari perhitungan tingkat capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b. Pada tahun 2024 terdapat perubahan penetapan indikator kinerja utama sesuai dengan Perwa Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024, adapun indikator kinerja utama yang kedua berubah menjadi Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target kinerja 95%, selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mendapatkan dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan pencapaian Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 95%.

c. Pada tahun 2024 target kinerja 95% dan realisasinya adalah 95% dengan tercapainya Persentase capaian kinerja berupa pelayanan tugas dan fungsi DPRD

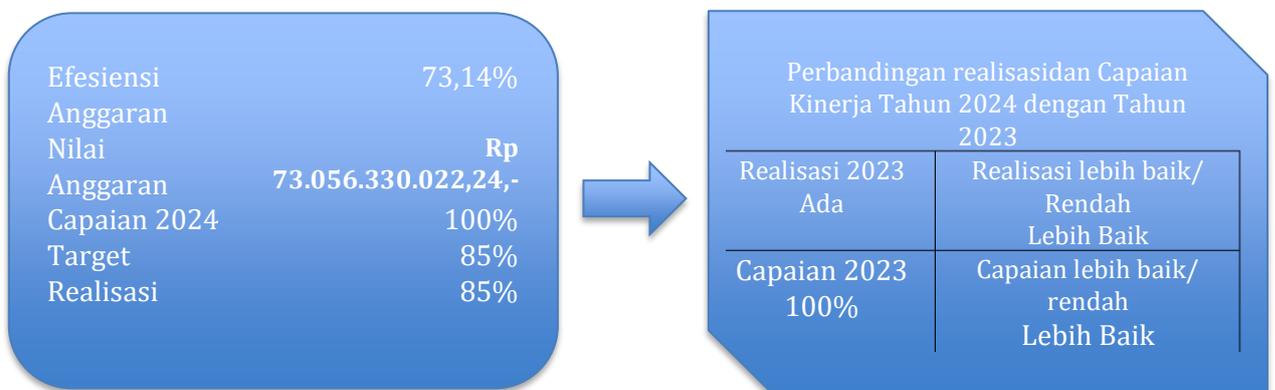


2. Indikator Kinerja Utama Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD

a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD dengan satuan target yaitu adanya rencana kerja tahunan alat-alat kelengkapan DPRD, adapun capaian pada tahun 2023 yaitu ada.

b. Pada tahun 2024 terdapat perubahan penetapan indikator kinerja utama sesuai dengan Perwa Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024, adapun indikator kinerja utama yang kedua berubah menjadi Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD dengan target kinerja 85% selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mendapatkan dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan pencapaian Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 85%.

c. pada tahun 2024 target kinerja berubah yakni persentase tersedianya rencana kerja alat kelengkapan DPRD dengan target 85%, adapun capaian kinerja 85%, sehingga dapat disimpulkan dengan kategori sangat berhasil.

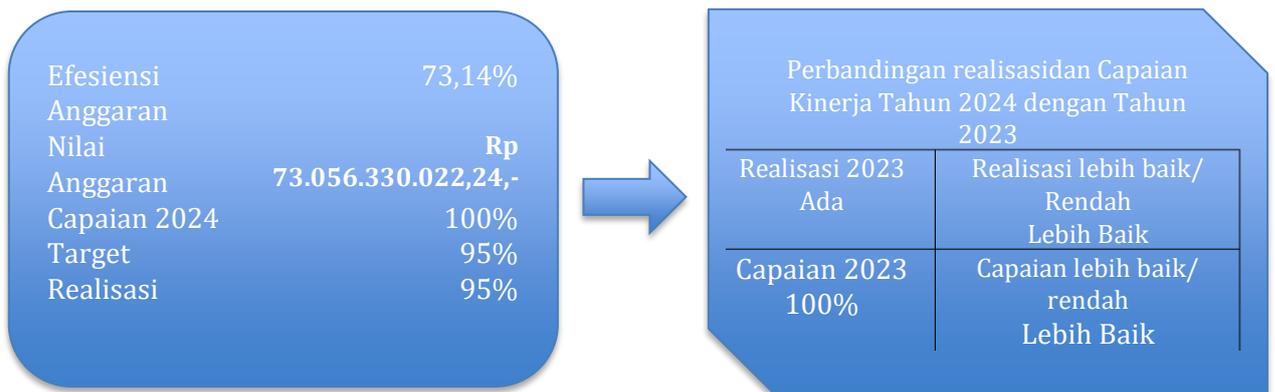


3. Indikator Kinerja Utama Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan

a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan, pada tahun 2023, pencapaian pada indikator kinerja utama ini yakni 100% hal ini didapat dari adanya susunan dan intergrasi program program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan.

b. Pada tahun 2024 terdapat perubahan penetapan indikator kinerja utama sesuai dengan Perwa Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024, adapun indikator kinerja utama yang ketiga berubah menjadi Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dengan target kinerja 95%, selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mendapatkan dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan pencapaian Realisasi kinerja indikator kinerja ketiga pada tahun 2024 adalah 95%

c. pada tahun 2024 target kinerja 95%, berbeda dengan tahun sebelumnya, sedangkan pencapaian kinerja pada tahun 2024 untuk indicator kinerja utama yang ketiga yakni 95%.

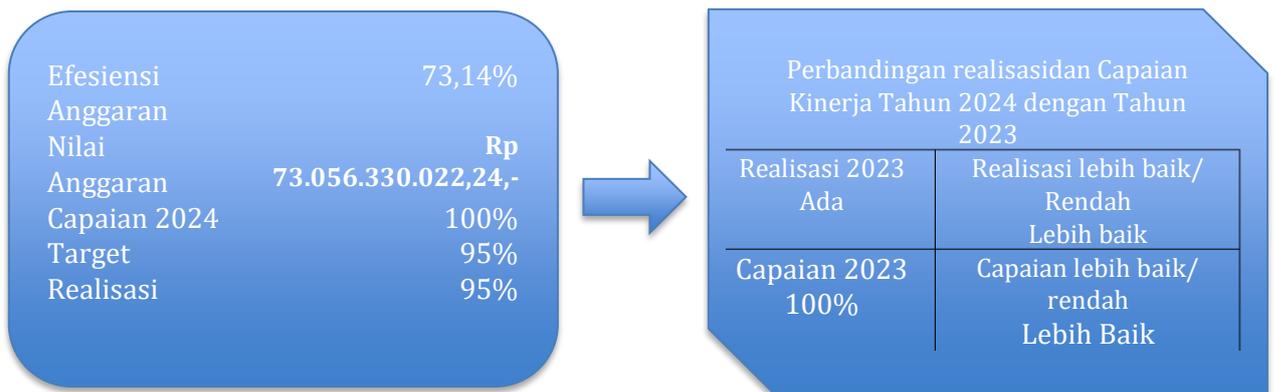


4. Indikator Kinerja Utama Persentase Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD,

a. Indikator Kinerja Yang ke empat adalah Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, pada tahun 2023 pada indicator kinerja utama yang keempat yakni 100% hal ini didapat dari adanya integrasi program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

b. Pada tahun 2024 terdapat perubahan penetapan indikator kinerja utama sesuai dengan Perwa Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024, adapun indikator kinerja utama yang keempat berubah menjadi Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD dengan target kinerja 95%, selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mendapatkan dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan pencapaian Realisasi kinerja indikator kinerja keempat pada tahun 2024 adalah 95%

c. pada tahun 2024 target kinerja yaitu 95%, berbeda dengan tahun sebelumnya, selanjutnya untuk pencapaian kinerja tahun 2024 untuk indicator kinerja utama yang ke empat ini yakni 95%.

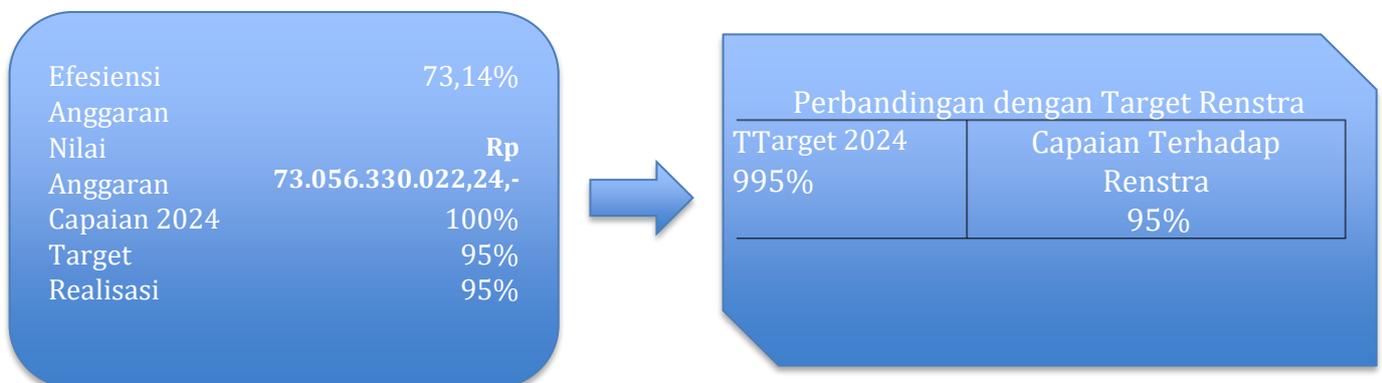


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

a. Indikator Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

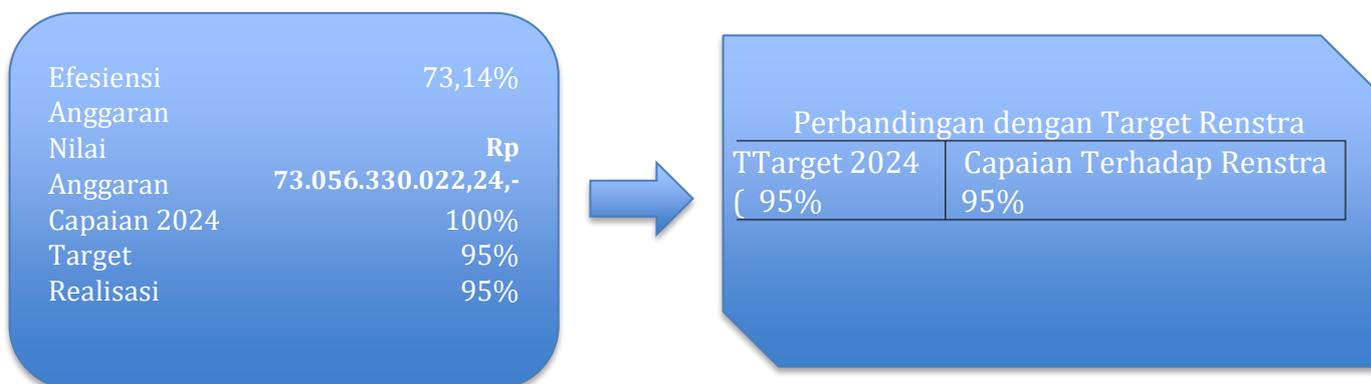
Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator **Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 95% dari target Renstra sebesar 95% dan terealisasi 95% pada tahun 2024



b. Indikator Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD

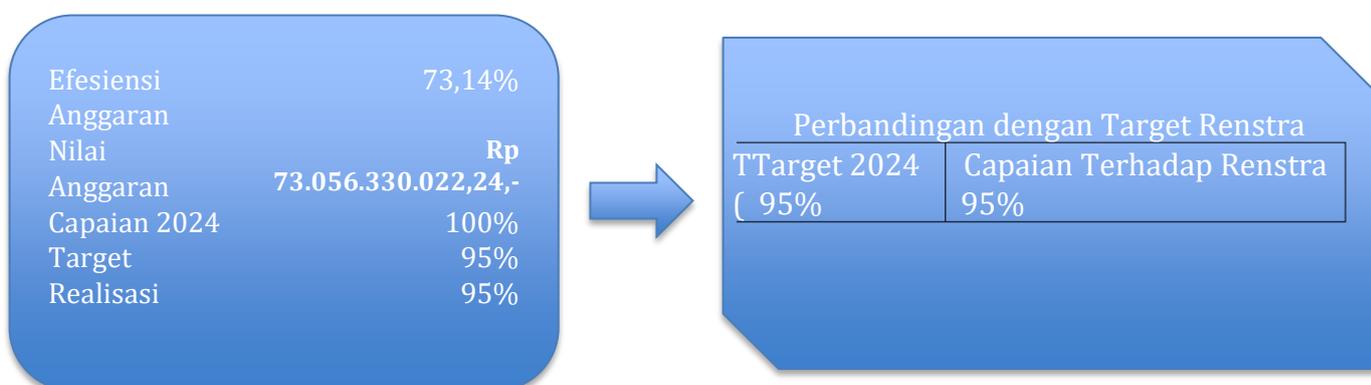
Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan

DPRD tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 90% dari target Renstra sebesar 90% dan terealisasi 85% pada tahun 2024



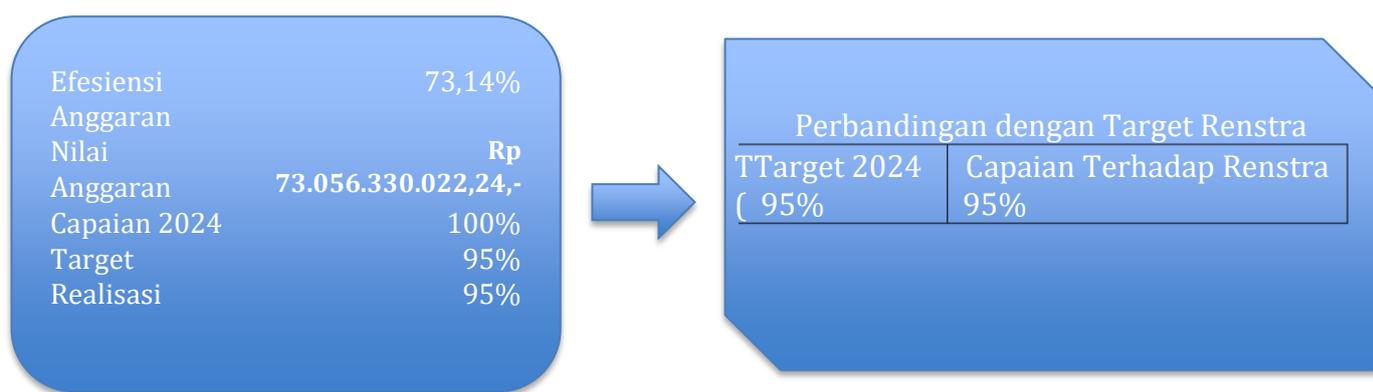
c. Indikator Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 95% dari target Renstra sebesar 95% dan terealisasi 95% pada tahun 2024



d. Indikator Persentase Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD,

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 95% dari target Renstra sebesar 95% dan terealisasi 95% pada tahun 2024



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana table berikut :

Tabel 17
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%		tidak terdapat target Nasional yang harus dicapai yang berhubungan langsung dengan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai
		Persentase Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	85%		
		Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD	95%		

		untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan			
		Persentase Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	95%		

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95 % realisasi sebesar 95% , tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95 % atau tercapai sebesar 100% %, maka capaian tahun 2023 tetap sebesar 100 %

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan – perubahan yang terjadi.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD ;

2. Indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 85% realisasi sebesar 85 % , tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yakni tersedianya alat- alat kelengkapan DPRD yang Satuanya RKT adalah Ada atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** indikator Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT. sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Terjalinnnya hubungan yang harmonis serta komunikasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;

3. Indikator Persentase tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 95%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan. sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan adalah sebagai berikut:

- Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

4. Indikator Persentase tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan

a. **Capaian kinerja** untuk Persentase Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2032 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian** Persentase Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi

pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD adalah sebagai berikut:

- Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas kedewanan.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD adalah sebagai berikut:

- meningkatkan komunikasi dan konsultasi kepada DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dalam penyusunan Program DPRD terhadap Dokumenn Perencanaan Sekretariat DPRD

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang bidang Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100	100	%	52.570.174.405	39.288.371.572	74.74%

2	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95	95	%	20.486.155.617	14.146.389.239	69.05%
3	Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan									
4	Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD									

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	73,14%
		Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	85%	
		Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	95%	
		Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	95%	

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD tingkat efisiensinya adalah 1.16 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (85%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024

- (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD tingkat efisiensinya adalah 1,29 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (95%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (73.14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 20 Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52,570,174,405	39,288,371,572
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226,800,000	195,722,130

		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	29,402,000
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30,000,000	29,416,000
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30,250,000	29,472,000
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25,000,000	24,380,000
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25,000,000	19,490,000
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,140,000	25,266,900
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,410,000	38,295,230
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,734,399,420	5,426,545,091
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,650,201,820	5,365,107,718
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35,823,200	24,139,300
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	30,000,000	25,969,473
		4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18,374,400	11,328,600
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15,000,000	8,425,000
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000	8,425,000
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		270,831,000	65,613,000
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46,179,000	40,500,000
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	67,500,000	25,113,000
		3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,500,000	-
		4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151,652,000	-
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12,870,239,225	10,630,978,273
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104,254,500	84,007,627

		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229,705,745	183,372,014
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	140,592,500	118,003,083
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185,668,500	156,217,938
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	201,712,980	126,881,880
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90,000,000	26,364,000
		7	Penyediaan Bahan/Material	35,000,000	-
		8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	229,805,000	174,571,714
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,653,500,000	9,761,560,017
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2,537,870,658	1,305,446,200
		1	Pengadaan Mebel	916,000,000	727,015,000
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,200,000,000	541,895,000
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329,591,858	14,700,000
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,278,800	21,836,200
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,817,653,846	2,273,195,092
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426,900,000	368,971,532
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	36,770,000
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,340,753,846	1,867,453,560
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,921,481,928	831,726,179
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,000,000	14,200,000
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250,163,000	200,886,713

		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260,320,000	113,030,422
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,219,762,446	493,627,444
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172,236,482	9,981,600
	9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		24,781,942,086	17,454,001,416
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23,924,899,186	17,454,001,416
		2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	857,042,900	-
	10	Layanan Administrasi DPRD		1,393,956,242	1,096,719,191
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1,393,956,242	1,096,719,191
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			20,486,155,617	14,146,389,239
	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		2,119,059,464	1,891,488,680
		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	705,666,000	656,972,680
		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	238,276,960	121,155,100
		3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	134,511,104	130,591,600
		4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	820,625,400	808,373,700
		5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	219,980,000	174,395,600
	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		1,671,962,000	1,299,314,852
		1	Pembahasan KUA dan PPAS	100,000,000	30,124,513
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	180,000,000	141,878,173
		3	Pembahasan APBD	304,000,000	261,417,420
		4	Pembahasan APBD Perubahan	452,606,000	328,058,708
		5	Pembahasan Laporan Semester	158,356,000	144,869,560
		6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	477,000,000	392,966,478
	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		692,569,880	493,038,580

		1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	51,000,000	11,621,700
		2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	45,344,000	29,948,500
		3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	43,878,000	29,483,200
		4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	47,676,000	18,911,300
		5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	43,234,480	20,632,400
		6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	78,380,000	53,354,100
		7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	58,848,000	37,220,950
		8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	324,209,400	291,866,430
	4	Peningkatan Kapasitas DPRD		2,946,254,000	1,597,382,223
		1	Orientasi DPRD	823,956,000	374,154,000
		2	Pendalaman Tugas DPRD	1,014,300,000	331,753,802
		3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	132,998,000	63,330,300
		4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360,000,000	234,000,000
		5	Penyusunan Program Kerja DPRD	25,000,000	17,443,880
		6	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	590,000,000	576,700,241
	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		3,218,124,725	1,449,227,844
		1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	428,604,800	217,255,967
		2	Pelaksanaan Reses	2,789,519,925	1,231,971,877
	6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		548,401,400	373,523,676
		1	Penyusunan Kode Etik DPRD	224,192,000	112,412,800
		2	Pengawasan Kode Etik DPRD	324,209,400	261,110,876
	7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		746,671,075	435,160,746
		1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	746,671,075	435,160,746
	8	Fasilitasi Tugas DPRD		8,543,113,073	6,607,252,638

		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,938,000,000	1,395,995,598
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	457,059,000	81,680,200
		3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1,644,000,000	916,008,235
		4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4,504,054,073	4,213,568,605

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat dirangkum setelah dilakukannya analisa terhadap data evaluasi kinerja perangkat daerah yang telah dituangkan pada Dokumen LKIP ini menunjukkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mampu mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya didalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai juga tentunya mengalami kendala kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, untuk itu tentunya perbaikan secara berkelanjutan akan dilaksanakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 15 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI


HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710605 199903 1013

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI
TAHUN 2021 - 2026**

Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)"
Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik
Sasaran :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN										SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				95%	95%	95%	95%	100%	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				95%	95%				Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Dumai	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	

										Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					-	-	95%	95%	95%				
										Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT					Ada	Ada	-	-	-				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
										Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT					-	-	85%	85%	85%				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
										Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen					Ada	Ada	-	-	-				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd

										Rencana Tahunan											
										Persentase Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan						95%	95%	95%			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
										Terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD				Ada	Ada						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd

**RENCANA AKSI
TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	95	25	50	75	95	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95%	11,855,630,163
		Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	%	85	25	50	75	85				
		Persentase tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana	%	95	25	50	75	95				
		Persentase terintegrasinya Program program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	%	95	25	50	75	95				
										Jumlah	11,855,630,163	





**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **HADIYONO, S.Hut, M.Si**
J a b a t a n : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI

Selanjutnya di sebut ***Pihak Pertama***.

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 1 Februari 2024
PIHAK PERTAMA

HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%
		Persentase ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	85%
		Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	95%
		Persentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	95%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 11.855.630.163	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.752.107.024,00	Pendukung





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **HADIYONO, S.Hut, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama.**

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024


PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95%
		Persentase ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	%	85%
		Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	%	95%
		Persentase terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	%	95%

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 20.488.155.617

Jumlah Rp. 20.488.155.617

Dumai, September 2024


 WALIKOTA
 KEDUA
 DUMAI
 H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

 HADIYONO, S.Hut, M.Si
 NIP. 197106051999031013

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	Satuan Target dan Realisasi	CAPAIAN	Satuan Capaian	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Satuan Capaian	
	I Belanja Operasi						Rp 58,685,373,428	Rp 52,085,909,088	88.75	%	
	II Belanja Modal						Rp 1,878,600,150	Rp 1,694,018,220	90.17	%	
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100	94.73	%	94.73	%	Rp 52,570,174,405	Rp 49,288,371,872	93.77	%	
	Indikator Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	dokumen	100	%	Rp 228,800,000	Rp 195,722,130	85.58	%	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	dokumen	100	%	30,000,000	Rp 29,402,000	98.01	%	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	dokumen	100	%	30,000,000	Rp 29,416,000	98.05	%	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	dokumen	100	%	30,250,000	Rp 29,472,000	97.43	%	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	dokumen	100	%	25,000,000	Rp 24,380,000	97.52	%	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	dokumen	100	%	25,000,000	Rp 19,490,000	77.96	%	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja	4	4	laporan	100	%	40,140,000	Rp 25,288,900	62.95	%	
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	laporan	100	%	46,410,000	Rp 39,295,230	84.67	%	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11	92.86	Dokumen	100	%	Rp 5,734,399,420	Rp 5,426,545,091	94.63	%	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45	45	Orang/Bulan	100	%	5,650,201,820	Rp 5,365,107,718	94.95	%	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	2	Laporan	100	%	35,823,200	Rp 24,139,300	67.38	%	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	7	7	Laporan	100	%	30,000,000	Rp 25,989,473	86.58	%	
	4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	dokumen	100	%	18,374,400	Rp 11,328,600	61.65	%	
	3 Administrasi Barang Milik Daerah	2	100.00	Laporan	100	%	Rp 15,000,000	Rp 8,425,000	56.17	%	
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Laporan	100	%	Rp 15,000,000	Rp 8,425,000	56.17	%	
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	72.00	3 Dokumen	2400	%	Rp 270,831,000	Rp 65,613,000	24.23	%	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45	45	orang	100	%	46,179,000	Rp 40,500,000	87.70	%	
	2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	Dokumen	100	%	87,500,000	Rp 25,113,000	28.70	%	
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	0	orang	0	%	5,500,000	Rp -	-	%	
	4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86	14	orang	16	%	151,652,000	Rp -	-	%	
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	100.00	%	105	%	Rp 12,870,239,225	Rp 10,630,978,273	82.60	%	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	12	paket	100	%	104,254,500	Rp 84,007,627	80.58	%	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	paket	100	%	229,705,745	Rp 183,372,014	79.83	%	
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	paket	100	%	140,592,500	Rp 118,003,083	83.93	%	

		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	paket	100	%	185,668,500	Rp	156,217,938	84.14	%
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	paket	100	%	201,712,980	Rp	126,861,880	62.90	%
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	dokumen	100	%	90,000,000	Rp	26,364,000	29.29	%
		7	Penyediaan Bahan/Material	5	5	paket	100	%	35,000,000	Rp	-	-	%
		8	Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	laporan	100	%	229,805,000	Rp	174,571,714	75.97	%
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1	laporan	100	%	11,653,500,000	Rp	9,761,560,017	83.77	%
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	95	100.00	%	105	%	Rp 2,537,870,658	Rp	1,305,446,200	51.44	%
		1	Pengadaan Mebel	40	40	Unit	100	%	916,000,000	Rp	727,015,000	79.37	%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	50	unit	100	%	1,200,000,000	Rp	541,885,000	45.16	%
		3	Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	unit	100	%	329,591,858	Rp	14,700,000	4.46	%
		4	Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	unit	100	%	92,278,800	Rp	21,836,200	23.66	%
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	100.00	%	105	%	Rp 2,817,653,846	Rp	2,273,195,092	80.68	%
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	laporan	100	%	426,900,000	Rp	368,971,532	86.43	%
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	laporan	100	%	50,000,000	Rp	36,770,000	73.54	%
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	6	laporan	100	%	2,340,753,846	Rp	1,867,453,560	79.78	%
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	100.00	%	105	%	Rp 1,921,481,928	Rp	831,726,179	43.29	%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	5	unit	100	%	19,000,000	Rp	14,200,000	74.74	%
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	9	unit	90	%	250,163,000	Rp	200,886,713	80.30	%
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	unit	100	%	260,320,000	Rp	113,030,422	43.42	%
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	unit	100	%	1,219,762,446	Rp	493,627,444	40.47	%
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	unit	100	%	172,236,482	Rp	9,981,600	5.80	%
	9		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	95	96.74	%	101.83	%	Rp 24,781,942,086	Rp	17,454,001,416	70.43	%
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	35	35	orang/bulan	100	%	23,924,899,186	Rp	17,454,001,416	72.95	%
		2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6	6	Paket	100	%	857,042,900	Rp	-	-	%
	10		Layanan Administrasi DPRD	95	100.00	%	105	%	Rp 1,393,956,242	Rp	1,096,719,191	78.68	%
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5	3	dokumen	60	%	1,393,956,242	Rp	1,096,719,191	78.68	%

	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95	96.38	%	101	%	Rp 20,488,155,617	Rp 14,146,389,239	69.05	%
		Indikator Program : Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									
	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	95	75	%	79	%	Rp 2,119,059,464	Rp 1,891,488,680	89.26	%
	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	5	dokumen	100	%	705,666,000	Rp 656,972,680	93.10	%
	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	6	dokumen	100	%	238,276,960	Rp 121,155,100	50.85	%
	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	5	5	dokumen	100	%	134,511,104	Rp 130,591,600	97.09	%
	4	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4	4	dokumen	100	%	820,625,400	Rp 806,373,700	98.51	%
	5	Penyusunan Tataertib DPRD	1	1	dokumen	100	%	219,980,000	Rp 174,395,600	79.28	%
	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	95	100	%	105	%	Rp 1,671,962,000	Rp 1,298,314,852	77.71	%
	1	Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	dokumen	100	%	100,000,000	Rp 30,124,513	30.12	%
	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	dokumen	100	%	180,000,000	Rp 141,878,173	78.82	%
	3	Pembahasan APBD	1	1	dokumen	100	%	304,000,000	Rp 261,417,420	85.99	%
	4	Pembahasan APBD Perubahan	1	1	dokumen	100	%	452,606,000	Rp 328,058,708	72.48	%
	5	Pembahasan Laporan Semester	2	2	dokumen	100	%	158,356,000	Rp 144,899,560	91.48	%
	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	dokumen	100	%	477,000,000	Rp 392,966,478	82.36	%
	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	95	100	%	105	%	Rp 692,569,880	Rp 493,038,580	71.19	%
	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	1	dokumen	100	%	51,000,000	Rp 11,621,700	22.75	%
	2	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	1	1	dokumen	100	%	45,344,000	Rp 29,949,600	66.05	%
	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	1	dokumen	100	%	43,876,000	Rp 29,483,200	67.19	%
	4	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perkonomian	1	1	dokumen	100	%	47,676,000	Rp 18,911,300	39.67	%
	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	1	dokumen	100	%	43,234,480	Rp 20,632,400	47.72	%
	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	dokumen	100	%	78,380,000	Rp 53,354,100	68.07	%
	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	1	dokumen	100	%	58,848,000	Rp 37,220,950	63.25	%
	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	dokumen	100	%	324,209,400	Rp 291,866,430	90.02	%
	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	95	100	%	105	%	Rp 2,946,254,000	Rp 1,597,382,223	54.22	%
	1	Orientasi DPRD	1	1	dokumen	100	%	823,956,000	Rp 374,154,000	45.41	%
	2	Pendalaman Tugas DPRD	4	4	dokumen	100	%	1,014,300,000	Rp 331,753,802	32.71	%
	3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16	16	orang	100	%	132,998,000	Rp 63,330,300	47.62	%

		4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	16	16	orang	100	%	360,000,000	Rp	234,000,000	65.00	%
		5	Penyusunan Program Kerja DPRD	1	1	dokumen	100	%	25,000,000	Rp	17,443,880	69.78	%
		6	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	1	dokumen	100	%	590,000,000	Rp	576,700,241	97.75	%
		5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	95	100	%	105	%	Rp 3,218,124,725	Rp	1,449,227,844	45.03	%
		1	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	1	1	dokumen	100	%	428,604,800	Rp	217,255,967	50.69	%
		2	Pelaksanaan Reses	3	3	dokumen	100	%	2,786,519,925	Rp	1,231,971,877	44.16	%
		6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	95	100	%	105	%	Rp 548,401,400	Rp	373,523,676	68.11	%
		1	Penyusunan Kode Etik DPRD	1	1	dokumen	100	%	224,192,000	Rp	112,412,800	50.14	%
		2	Pegawasan Kode Etik DPRD	1	1	laporan	100	%	324,209,400	Rp	261,110,876	80.54	%
		7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	95	100	%	105	%	Rp 746,671,075	Rp	435,160,746	58.28	%
		1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1	1	dokumen	100	%	Rp 746,671,075	Rp	435,160,746	58.28	%
		8	Fasilitas Tugas DPRD	95	100	%	105	%	Rp 8,543,113,073	Rp	6,607,252,638	77.34	%
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	3	dokumen	100	%	1,938,000,000	Rp	1,395,995,598	72.03	%
		2	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	1	dokumen	100	%	457,059,000	Rp	81,680,200	17.87	%
		3	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	1	1	dokumen	100	%	1,644,000,000	Rp	916,008,236	55.72	%
		4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5	5	dokumen	100	%	4,504,054,073	Rp	4,213,568,605	93.55	%